



PENGARUH KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI, PENGELOLAAN ASET TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI PADA OPD KABUPATEN ROKAN HILIR)

Redian Mulyadita

Dosen Perbankan Syariah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi

[email: redianmulyadita@yahoo.co.id](mailto:redianmulyadita@yahoo.co.id)

ABSTRACT

Influence of Human Resources Capacity, Utilization of Technology, Asset Management on the Quality of Financial Reports of Local Governments (Study on OPD of Rokan Hilir District)

The purpose of this study was to determine the effect of human resource capacity, utilization of technology, asset management on the quality of local government financial reports (study on OPD Rokan Hilir Regency). The data in this study were collected from questionnaires that had been filled out by 115 civil servant respondents in Rokan Hilir Regency. Data were analyzed using multiple linear regression using IBM SPSS version 21. The results showed that there was a significant influence of human resource capacity, utilization of technology and asset management on the quality of the financial statements of the Rokan Hilir local government with a significant level or $P_{value} < \alpha 0.05$, which was 0.000, 0.000, 0.004.

Keywords: *Human Resources Capacity, Utilization of Technology, Financial Reports*

ABSTRAK

Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi, Pengelolaan Aset Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada OPD Kabupaten Rokan Hilir)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, pengelolaan aset terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (studi pada OPD Kabupaten Rokan Hilir). Data dalam penelitian ini dikumpulkan dari kuesioner yang telah diisi oleh 115 responden pegawai negeri sipil di Kabupaten Rokan Hilir. Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan menggunakan IBM SPSS versi 21. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh signifikan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi

dan pengelolaan aset terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Rokan Hilir dengan tingkat signifikan atau $P_{\text{value}} < \alpha 0.05$ yaitu sebesar 0.000, 0.000, 0.004.

Kata Kunci : Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi, Laporan Keuangan

1. PENDAHULUAN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran. Tujuan umum laporan keuangan pemerintah daerah adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah daerah yang disajikan diharapkan mempunyai kualitas dengan tingkat karakteristik yang memadai. Apabila laporan keuangan pemerintah daerah tidak sesuai karakteristik yang memadai, maka akan mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya, yang nantinya akan berdampak pada kerugian daerah, potensi kekurangan daerah, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sumber daya. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dijelaskan bahwa laporan keuangan yang berkualitas itu harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, yaitu: (1) relevan, (2) andal, (3) dapat dibandingkan, dan (4) dapat dipahami. (Yuliani, Nadirsyah dan Bakar 2010).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus mengikuti standar akuntansi pemerintahan sesuai Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010. Tujuan diberlakukannya hal tersebut adalah agar lebih accountable dan semakin meningkatkan kualitas laporan keuangan. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan tingkat baik buruknya laporan atas pengelolaan keuangan daerah selama satu periode.

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen pada instansi pemerintah untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi dalam laporan keuangan. Pembuatan laporan keuangan adalah suatu kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas berupa keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, BPK Perwakilan Provinsi Riau melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2015 pada semester I tahun 2016.

Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016 dikemas dalam tiga buku. Buku I adalah LHP yang memuat Laporan Keuangan Pemerintah dan opini atas

Laporan Keuangan tersebut. Buku II memuat atas Sistem Pengendalian Intern dan Buku III adalah LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian atas pengecualian untuk nilai aset tetap dan nilai penyusutan aset tetap. Pada tahun 2017, Rokan Hilir kembali mendapat Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), pada sebelumnya bupati Rokan Hilir yakin mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan selama delapan belas tahun Kabupaten Rokan Hilir hanya memperoleh predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). (Sumber: pekanbaru.bpk.go.id.)

Fakta tersebut menunjukkan tidak adanya transparansi yang dapat menghambat kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Ketidakmampuan laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas tidak saja disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna karena laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan aksesibel pada para pengguna potensial.

Berdasarkan persoalan di atas, maka muncul pertanyaan, apakah kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengelolaan aset berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah?

Adapun penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengelolaan aset berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

2. TINJAUAN PUSTAKA

1) *Decision-Usefulness Theory*

Scott (2009) menyatakan bahwa perspektif pelaporan keuangan yang memfokuskan pelaporan informasi yang berguna bagi investor dan masyarakat (publik) disebut *decision usefulness approach*. Dalam teori kegunaan keputusan (*decision-usefulness theory*), informasi akuntansi menjadi referensi dari penyusunan kerangka konseptual *Financial Accounting Standard Boards* (FASB), yaitu *Statement of Financial Accounting Concepts* (SFAC) yang berlaku di Amerika Serikat (Kiswara 2011 dalam Rahmawati, 2015). SFAC No 2 tentang *Qualitatif Characteristics of Accounting Information* menggambarkan hirarki dari kualitas informasi akuntansi dalam bentuk kualitas primer, kandungannya dan kualitas sekunder. PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan telah mengadopsi karakteristik kualitatif primer sebagaimana tercantum dalam SFAC No 2, hanya saja SAP menekankan pada empat prasyarat normatif, yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

2) *Technology Acceptance Model (TAM)*

Technology Acceptance Model (TAM) merupakan salah satu model yang dibuat untuk menganalisis dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi diterimanya penggunaan teknologi komputer. TAM merupakan hasil pengembangan dari *Theory of Reasoned Action (TRA)*.

Menurut Davis (1986) perilaku menggunakan teknologi informasi diawali oleh adanya persepsi mengenai manfaat dan persepsi mengenai kemudahan menggunakan teknologi informasi. Davis mengartikan persepsi mengenai kegunaan ini berdasarkan definisi dari kata *useful* yaitu dapat digunakan untuk tujuan yang menguntungkan serta

manfaat yang dapat diperolehnya apabila menggunakan teknologi informasi.

Perceived Usefulness (Persepsi Kebermanfaatan) dan *Perceived Ease of Use* (Persepsi Kemudahan Penggunaan) mempengaruhi *Attitude Toward Using* individu terhadap penggunaan teknologi. Peningkatan pada *Perceived Ease of Use* secara instrumental mempengaruhi kenaikan dari *Perceived Usefulness* karena sebuah sistem yang mudah digunakan tidak membutuhkan waktu lama untuk dipelajari sehingga individu memiliki kesempatan untuk mengerjakan sesuatu yang lain sehingga berkaitan dengan efektifitas kinerja (Davis, Bagozzi dan Warshaw, 1989: 987). *Attitude Toward Using* dalam TAM dikonsepsikan sebagai sikap terhadap penggunaan sistem yang berbentuk penerimaan atau penolakan sebagai dampak bila seseorang menggunakan suatu teknologi dalam pekerjaannya.

3) **Kualitas Laporan Keuangan**

Menurut Harahap (2011: 126-129) kualitas laporan keuangan adalah informasi yang lengkap dan transparan, dirancang tidak menyesatkan kepada pengguna. Agar laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya maka harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.

4) **Kapasitas Sumber Daya Manusia**

Menurut Primayana, Atmadja dan Darmawan (2004 dalam Andrianto:2017), pengertian kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan yang meliputi tingkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang memadai dari manusia untuk menyelesaikan tugas ataupun tanggungjawab yang diberikan kepadanya.

5) **Pemanfaatan Teknologi**

Pengertian teknologi informasi menurut Suyanto (2005:10) adalah sebagai berikut: Teknologi informasi merupakan sebuah bentuk umum yang menggambarkan setiap teknologi yang membantu menghasilkan, memanipulasi, menyimpan, mengkomunikasikan, dan atau menyampaikan informasi (Suyanto 2005).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan serta memanfaatkan kemajuan teknologi informasi agar dapat meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, maupun menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik.

6) **Pengelolaan Aset**

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP.225/MK/V/4/1971 pasal 1 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 350/KMK.03/1994 serta Nomor 470/KMK.01/1994, bahwa yang dimaksud dengan barang-barang milik Negara/ Kekayaan Negara adalah semua barang bergerak dan tidak bergerak yang dimiliki/ dikuasai oleh instansi pemerintah pusat yang sebagian atau seluruhnya dibeli atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta perolehan lain yang sah, dalam hal ini tidak termasuk kekayaan Negara yang dipisahkan (yang dikelola BUMN) dan kekayaan Pemerintah Daerah (BP. Panca Usaha:2001)

Menurut Basuki (2000:151) pengelolaan barang milik daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah, barang milik daerah disini adalah barang berwujud, yakni semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD dan berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pengelolaan aset daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap Barang Daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian (Tahyudin, 2015).

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan populasi pegawai di satuan kerja perangkat daerah (OPD) Rokan Hilir. Teknik pengambilan sampel *purposive sampling* dengan karakteristik sampel adalah pegawai / ASN yang melaksanakan kegiatan Akuntansi/ Tata Usaha Keuangan yaitu Kepala Bagian dan Kepala Subbagian Keuangan/ Akuntan (pembuku) dan Bendahara (penerimaan dan pengeluaran) yang terlibat langsung dalam pelaporan keuangan di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Sampel penelitian berjumlah 115 orang. Analisis yang digunakan yaitu : *multiple regression analysis* dan *Moderated Regression Analysis*.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil regresi kapasitas sumber daya manusia (X_1) terhadap kualitas laporan keuangan (Y) memberikan nilai t_{hitung} sebesar 4,954 nilai ini lebih besar dari t tabel t_{tabel} 1,984 dengan nilai P_{value} $0,000 < 0,05$. Sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima artinya variabel kapasitas sumber daya manusia (X_1) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Y) Pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Hasil regresi kapasitas sumber daya manusia (X_1) terhadap kualitas laporan keuangan (Y) memberikan nilai t_{hitung} sebesar 3,752 nilai ini lebih besar dari t tabel t_{tabel} 1,984 dengan nilai P_{value} $0,00 < 0,05$. Sehingga H_0 ditolak dan H_2 diterima artinya variabel pemanfaatan teknologi (X_2) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Y) Pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir. Hasil regresi pengelolaan aset (X_3) terhadap kualitas laporan keuangan (Y) memberikan nilai t_{hitung} sebesar 2,961 nilai ini lebih besar dari t tabel t_{tabel} 1,984 dengan nilai P_{value} $0,04 < 0,05$. Sehingga H_0 ditolak dan H_3 diterima artinya variabel pengelolaan aset (X_3) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Y) Pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir. Hasil analisis regresi berganda dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1
Analisis Regresi Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,365	,386		,946	,346
1 KSDM	,464	,094	,382	4,954	,000
PT	,269	,072	,283	3,752	,000
PA	,278	,094	,240	2,961	,004

a. Dependent Variable: KLK

Sumber: Data Primer Olahan, 2018

Dari hasil regresi maka dapat dibuat persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = 0,365 + 0,382 X_1 + 0,283 X_2 + 0,240 X_3 + e$$

Persamaan regresi tersebut mempunyai arti sebagai berikut :

1. Koefisien regresi kapasitas sumber daya manusia 0,382 artinya peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebesar 1 % akan meningkatkan kualitas laporan keuangan sebesar 38%.
2. Koefisien regresi pemanfaatan teknologi 0,283 artinya peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebesar 1 % akan meningkatkan kualitas laporan keuangan sebesar 28%.
3. Koefisien regresi pengelolaan aset 0,240 artinya peningkatan pengelolaan aset sebesar 1 % akan meningkatkan kualitas laporan keuangan sebesar 38%.

PEMBAHASAN

Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi atau keuangan yang mengisi posisi atau jabatan di sebuah instansi pemerintahan maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sumber daya manusia yang memiliki keahliannya di bidang akuntansi akan dapat menyelesaikan tugas dan fungsinya dengan baik guna mencapai tujuan organisasinya. Kapasitas sumber daya manusia tak hanya diperoleh dari jenjang pendidikan tetapi bisa juga dari pelatihan yang diadakan oleh pemerintah. Semakin tinggi Kapasitas Sumber Daya Manusia, maka semakin tinggi pula Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini juga mendukung teori Scott (2009) menyatakan bahwa

perspektif pelaporan keuangan yang memfokuskan pelaporan informasi yang berguna bagi investor dan masyarakat (publik) guna mengambil keputusan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Andrianto (2017) yang menyatakan bahwa Kapasitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Selain itu hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian dari Soimah (2014) yang menyatakan bahwa Kapasitas SDM berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengelolaan data transaksi keuangan, penyajian laporan keuangan, serta dapat menghindari kesalahan dalam melakukan posting dari dokumen buku, jurnal, buku besar, hingga menjadi kesatuan laporan keuangan yang utuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan pemerintah daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada layanan publik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andrianto (2017), Hardyansyah (2016) dan Roshanti (2014) yang menyatakan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Penilaian aset yang baik dan akurat atas barang milik daerah dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan daerah, dan pengelolaan aset juga mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat dijadikan bahan untuk memperkuat argumentasi BPK dan juga menjadikan pemerintah daerah lebih memperhatikan pengelolaan aset daerah. Sehingga perencanaan kebutuhan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dilakukan dengan baik, dalam rangka pengelolaan aset yang merupakan implementasi tindakan untuk mendukung kepastian nilai, yaitu adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan aset serta penyusunan neraca pemerintah daerah. Maka pengelolaan aset yang baik akan menjadikan kualitas laporan keuangan daerah yang baik.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Hidayat *et al.* (2016) dan Anshari (2016) yang meneliti tentang pengaruh pengelolaan aset terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan pengawasan dan pengendalian berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Bayu (2015), Rizki M.B (2017) bahwa Pengelolaan Aset Daerah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

5. KESIMPULAN

Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Rokan Hilir. Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh

terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Pengelolaan Aset berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyanto. 2017. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Sleman). Yogyakarta: Program Studi Akuntansi Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Basuki. 2000. Pengelolaan Keuangan Daerah. Yogyakarta : Karya tulis Widyaiswara Pendidik Pegawai BPK.
- Bayu, 2015. Pengaruh Pengelolaan Aset Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi.\
- Davis 1986. Technology Acceptance Model for Empirically Testing New End User Information System Theory And Result. Masshacusset Institute Of Information Technology. New York: MIT
- Doli, D. Siregar. 2004. Manajemen Aset Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional dalam konteks Kepala Daerah sebagai CEO's pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Financial Accounting Standard Board (FASB). 2001. Original Pronouncement. New York : John Wiley & Sons
- Hanoni, T. 2016. Pemanfaatan Teknologi Informasi Modern. Bandung: Alfabeta.
- Harahap 2011. Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan, Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Jonas, G. dan Blanchet, J. 2000. Asuming Quality of Financial Reporting. Accounting Horizons. New York: McGraw Hill Inc.
- Mahmudi. 2011. Manajemen Kinerja Sektor Publik..Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2010. Akuntansi Sektor Publik, edisi 2. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Scott. 2009. Financial Accounting Theory, Edisi 5. Pearson Prentice Hall.
- Siregar, D. 2004. Manajemen Aset: Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan Secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah Sebagai CEO's pada Era Globalisasi dan.
- Soimah, S. 2014. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern
- Suyanto, M. 2005. Pengantar Teknologi Informasi Untuk Bisnis. Yogyakarta: Andi.
- Undang - Undang No 15 tentang Pemeriksaan Pertanggung jawaban Keuangan Negara 2004
- Wilkinson, W. Joseph, Michael J. Cerullo, VasantRaval, & Bernard Wong-On- Wing. 2000. Accounting Information Systems: Essential Concepts and Applications. Fourth Edition. John Wiley and Sons. Inc.

www.bps.go.id/publika
[si](#) diakses pad tanggal 5